Apropriasi Embrio Sulawesi Selatan di Yogyakarta

masyarakat Substitution of the Contract of the

Pare-Par

Wajo

Kab Barru

Kab) Soppeng

Kab Pangkajiene Kab Bone

Kota Makasar

Kab Sinjai

Kab Takalan

Bulkumba

Kab Selayar

Kab Bantaeng

Jeneponto

Editor:

Andi Fajar Asti

Kata Pengantar:

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H Dr. Sudirman Saad, S.H.M.Hum.



Apropriasi Embrio Sulawesi Selatan di Yogyakarta

sulawesi Sulawesi Selatan

Apropriasi Embrio Sulawesi Selatan di Yogyakarta

masyarakat Sulawesi Selatan

Kata Pengantar: Dr. H. Syahrul Yasin Limpo,S.H.,M.Si.,M.H Dr. Sudirman Saad, S.H.M.Hum.

> Editor : Andi Fajar Asti







MASYARAKAT SULAWESI SELATAN; Apropriasi Embrio Sulawesi Selatan di Yogyakarta, Andi Fajar Asti (ed.). Copyright ©2010

Editor : Andi Fajar Asti Proof Reader : Iqbal, AP-Anis,K & Erwin, s Desain Sampul : David Layout : Bung Irwan

> Cetak Pertama, Juni 2010 xii + 264 hlm.15,5 x 23 cm ISBN: 978-979-1583-39-8

Penerbit Buku:

Diagnosa Institute PRESS Jl. Sunaryo No 4. Kota Baru. Yogyakarta. Hp: 081354945575. Email: fajarpresiden@yahoo.com

Penerbitan buku ini atas kerjasama Keluarga Anging Mammiri Mahasiswa Pascasarjana Sulawesi Selatan

dengan

Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan perikanan Republik Indonesia.

All rights reserved Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahas Esa, dengan rahmat dan hidayahnya telah berhasil menyelesaikan suatu karya dalam bentuk buku berjudul "Masyarakat Sulawesi Selatan: Apropriasi Embrio Sulawesi Selatan Di Yogyakarta" yang ditulis oleh KAMPs Sulawesi Selatan – Yogyakarta.

Buku ini mencoba melihat Sulawesi Selatan dalam berbagai perspektif, mulai dari potret intelektual Bugis Makassar, Demokrasi, Hukum, Kepribadian, Etos Kerja, Stratifikasi sosial, Tawuran Mahasiswa, Pendidikan, sampai dengan masalah lingkungan hidup Sulawesi Selatan. Buku ini sangat menarik karena merupakan manuskrip yang telah didiskusikan oleh para intelektual muda Sulawesi Selatan yang ada di Yogyakarta. Buku ini telah memberikan gambaran bagaimana intelektual Bugis Makassar dalam penyebar luasan pengetahuan yang selalu berpihak pada kebenaran, dan ini telah diperlihatkan sejak dulu oleh para figur seperti Karaeng Patingaloang, Syekh Yusuf di Makassar dan Mattulada. Dalam buku ini kita dapat mengetahui bagaimana dinamika Dui Menre (Uang Belanja) dalam melakukan pernikahan, yang pada dasarnya masyarakat Bugis Bone tidak begitu mempermasalahkan Dui Menre, namun saat ini telah merupakan budaya yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan. Dibagian akhir buku ini juga mengangkat budaya siri yang merupakan konsep kesadaran hukum dan falsafah masyarakat bugis Makassar yang dianggap sangat sakral. Begitu sakral kata itu, sehingga apabila seseorang kehilangan siri'na (malunya), atau De'ni Gaga Siri'na (tidak ada malunya), maka tidak ada lagi artinya dia menempuh kehidupan sebagai manusia, kita barharap siri' atau malu dapat dipertahankan sebagai bagian budaya Sulawesi Selatan, terutama yang duduk dalam pemerintahan, sehingga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan. Wacana tentang lingkungan hidup di Sulawesi Selatan juga disentuh dalam buku ini, terimakasih atas kritik dan rekomendasi yang konstruktif atas Program Sulawesi Selatan *Go Green* kedepan.

Akhir kata, saya menyambut baik dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi kita akan kondisi Sulawesi selatan dalam berbagai perspektif, disamping itu akan dapat memberikan motivasi kepada para pembaca khususnya mahasiswa yang ada di Makassar maupun luar Makassar, agar senantiasa melakukan kajian-kajian yang ditulis dalam bentuk buku dan nantinya dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan. Selamat membaca.

Gubernur Sulawesi Selatan

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.

KATA PENGANTAR

DIRJEN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Adalah sebuah idtikad baik untuk memandang ranah lokal dalam kacamata keilmuan, lalu memberi pikiran alternatif sekaligus solusi untuk perubahan multidimensi. Buku "Masyarakat Sulsel: Apropriasi Embrio Sulsel di Yogyakarta, mengandaikan upaya melihat Sulawesi-Selatan (Sulsel) dari jauh (Yogyakarta), karena itulah ada cara pembacaan yang relatif objektif atau setidaknya titik tekan yang berbeda ketika ranah lokal itu dieksplor dari dalam.

Tema-tema yang diulas lebih tepat disebut sebagai interpretasi kritis dan sarat emosional. Mengapa demikian? Pertama, para penulis yang merupakan para intelektual yang hidup dan merasakan dinamika sosial Sulsel dipastikan akan banyak perpijak pada realitas pengalamannya. Ketika pengalaman itu dikawinkan dengan konteks kekinian dimana ada banyak problematik di sana, maka cara pandang seperti itu sangatlah reflektif dan sekaligus futuristik. Penulis-penulis dalam buku ini sesungguhnya mendambakan sebuah reorientasi dan perubahan subtansial setidaknya pada tema-tema yang diangkat.

Kedua, pembacaan kaum intelektual yang dalam beberapa tahun mengambil jarak dengan konteks sosialnya, dan konsen dalam tradisi akademik yang serba teoritik akan sangat khas dalam menjelaskan persoalan. Pikiran-pikiran yang diuraikan pastilah bersumber dari perpaduan antara pendalaman akademis, dimana perpektif yang dipakai langsung diarahkan pada kasus-kasus lokal—dengan demikian ada refleksi kritis yang akan memberi sumbangsi besar pada perubahan sosial yang mungkin terjadi dan pengembangan pengetahuan di bidang tertentu.

Sulawesi Selatan sebagai gerbang Indonesia Timur, setidaknya dalam satu dekade terakhir ini mengalami perkembangan sangat pesat. Pertumbuhan investasi dan terbukanya ruang-ruang ekonomi dan pariwisata telah menjadikan Sulsel menjadi alternatif bagi para banyak orang dari belahan dunia. Pengaruh globalisasi pun masuk perlahan dan telah mewarnai dinamika masyarakat terutama di perkotaan. Persoalan-persoalan sosial pun kemudian bermunculan termasuk ancaman degradasi nilai akibat akses tekonologi-informasi tanpa batas.

Dalam konteks itulah, diperlukan upaya bersama dalam merumuskan solusi yang efektif dalam merespon persoalan-persoalan yang bermunculan. Apa yang dilakukan oleh Keluarga Angingmamiri Mahasiswa Pascasarjana Sulsel (KAMPS) jelas memberi sumbangan besar terhadap persoalan-persoalan di Sulsel. Tentu saja dalam kerangka akademik, wacana yang dimunculkan harus dirumuskan kembali sampai pada penemuan solusi dan formulasi yang lebih teknis—dengan demikian, sumbangsih kaum intelektual bisa menjadi rekomendari yang real bagi para pengambil kebijakan.

Pada akhirnya kami memberi apresiasi setinggi-tingginya terhadap sekumpulan pemikiran dan catatan kritis dari penulis yang multi-disiplin. Hal ini menunjukkan adanya kepeduliaan tinggi dan tanggung jawab moral bagi insan akademik, sekaligus menepis kesangksian banyak pihak bahwa kaum akademik lebih berorientasi individual dan cenderung esklusif.

Penerbitan buku dengan tema-tema lokal seperti ini harus terus dihidupkan terutama dalam rangka mewacanakan transformasi nilai lokal (local genius). Dalam konteks globalisasi dan industrialisasi yang berkembang pesat, internalisasi nilai lokal pada generasi muda sangatlah diperlukan dalam rangka menepis pengaruh-pengaruh negatif dari gelombang modernisasi yang bebas nilai.

Keberadaan para mahasiswa Sulsel di Yogyakarta terutama yang belajar di level Pascasarjana memang memiliki kompetensi strategis dalam memberi sumbangan pemikiran. Patut untuk didukung dan diteruskan di tahun-tahun mendatang, sehingga persoalan-persoalan di ranah lokal tidak sekedar diakses dari kejauhan melalui media informasi, tetapi juga bisa melahirkan kepekaan intelektual yang akan merangsang para intelektual asal Sulsel di yogyakarta untuk terlibat dalam pemecahan persoalan daerah.

Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Dr. Sudirman Saad, S.H.M.Hum

KATA SAMBUTAN

Kami menyambut positif inisiatif Keluarga Angingmamiri Mahasiswa Pascasarjana Sulsel (KAMPS) dengan menerbitkan buku berjudul "Masyarakat Sulsel: Apropriasi Embrio Sulsel di Yogyakarta", sekaligus memberi apresiasi atas proses kreatif yang dilakukan para mahasiswa rantau asal Sulawesi-Selatan (Sulsel) di Yogyakarta. Buku ini menunjukkan adanya kepedulian moral dan kontribusi pemikiran kepada daerah dan persoalan-persoalan sosial, hukum, politik dan kebudayaan di Sulsel.

Keberadaan para mahasiswa asal Sulsel di Yogyakarta kemudian harus dipandang sebagai aset daerah yang kelak akan kembali dan berkontribusi di ranah lokal. Atau setidaknya, memberi citra positif bahwa para mahasiswa di perantauan sungguh-sungguh membekali dirinya dengan kapasitas pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuannya itu memiliki arti yang sangat penting dalam memandang persoalan-persoalan yang berkembang, dengan demikian para mahasiswa itu memberikan andil yang sangat besar dalam perubahan dan pembangunan khususnya di Sulsel.

Oleh sebab itulah, penerbitan buku seperti ini harusnya menjadi agenda penting yang tidak hanya sekali dua kali, tetapi bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Tema-tema yang diangkat pun bisa lebih bervariasi dan kontekstual, khususnya persoalan-persoalan yang menyangkut kepemudaan. Dengan demikian, proses kreatif dan transformasi intelektual bisa dilakukan secara berkelanjutan serta semakin konstruktif. Hal ini semakin mempertegas betapa strategis peran intelektual muda dalam pembangunan masyarakat dan daerah, pada saat yang sama akan terus merangsang bangkitnya gairah intelektual dari generasi ke generasi.

Bangkitnya iklim intelektual yang lebih transformatif akan mengubah tren mahasiswa yang selama ini sangat esklusif dan anti-produktif, menjadi inklusif dan produktif. Diskusi-diskusi intelektual, terutama isu-isu daerah yang sifatnya visioner dan konstruktif bisa lebih diaktifkan sehingga setiap saat para mahasiswa di perantauan bisa melahirkan rekomendasi yang berharga bagi daerah. Pembentukan karakter kepemimpinan yang visioner dengan kapasitas intelektual yang memadai bisa dipastikan akan bertumbuh-subur setiap saat, sehingga kita tidak lagi mengalami krisis kepemimpinan dan krisis Sumber Daya Manusia (SDM).

Dari kampus, ide-ide itu direproduksi untuk menjelaskan dan memecahkan persoalan-persoalan dalam realitas. Sebaliknya, realitas-realitas itu akan dipandang sebagai studi kasus yang harus terus dikorelasikan dengan teori-teori akademis. Siklus ini sangatlah menarik untuk dihidupkan, ditengah euforia akademik yang kadang menjauh dan menghindar dari dialektika sosial. Kontribusi yang dilakukan KAMPS ini akan menjadi catatan penting yang selama-lamanya akan terkenang dan terdokumentasi.

Pada akhirnya, sekali lagi kami mengucapkan selamat atas penerbitan buku ini, semoga bisa dibaca dan berguna bagi semua kalangan, khususnya masyarakat Sulsel. Dukungan dan support dari semua kalangan, terutama Pemerintah Daerah (PEMDA) sangat dibutuhkan dalam rangka penerbitan-penerbitan tematema yang lain. Kami menilai, program-program penerbitan seperti ini lebih kongkrit dari sekedar aksi-aksi jalanan yang tidak melahirkan solusi yang konstruktif. Selamat untuk para mahasiswa Sulsel di yogyakarta, khususnya yang tergabung dalam KAMPS, buku ini menjelaskan eksistensi anda semua sebagai ilmuan produktif. Selamat membaca!

Ketua Umum KAMPS Sulawesi Selatan —Yogyakarta

Andi Fajar Asti

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Gubernur Sulawesi Selatan ~ v

Dirjen Kelauatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ~ vii

Sambutan

Ketua Umum KAMPS Sulawesi Selatan-Yogyakarta Periode 2009-2010 ~ ix Daftar Isi ~ xi

- 1. Potret Intelektual Makassar-bugis Muhtar Haboddin ~ 1
- 2. DEMOKRASI BERBISIK DAN TRANSISI DEMOKRASI: Konflik Politik dalam Suksesi Elit Lokal Kasus Komunitas Santri Binanga Kabupaten **Enrekang** M. Ridhah Taqwa ~ 13

- Penguasa-Penguasa dari Seberang M. Junaidi ~ 25
- MILITER DALAM PARTAI POLITIK: Studi Modalitas Konsolidasi Mayjend (Purn) HZB Palaguna di DPD PDIP Sul-Sel Pasca Konflik Konferda 2006

Andi Ali Said Akbar ~ 35

- 5. Arti Pentingnya Memperbandingkan Hukum Adat dan KUHPerdata dan Manfaatnya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia A. Nuzul ~ 57
- 6. Tipe Kepribadian dan Komitmen Perkawinan dengan Pemaafan Terhadap Kebohongan Pasangan di Tinjau dari Perkawinan Bugis Faradillah Firdaus ~ 75
- Dinamika Dui' Ménré' dalam Pernikahan Bugis Bone di Sulawesi Selatan 7. Juhansar Andi Latief ~ 83

- Menakar Etos Kerja Orang Bugis-makassar Menurut Tradisi Bangsa Jepang Mukhtasar Syamsuddin ~ 103
- 9. Pudarnya Ritual Massure' dan Maddoja Bine di Tanah Bugis Aslan Abidin ~ 113
- 10. Ekspresi Semiotik Tokoh Kajao Lali'do dalam Lontarak Latoa Herawati ~ 125
- 11. Ragam Hias Pada Rumah Tradisional Bugis; Pandangan Kosmologi, Seni dan Simbolik
 Pangeran Paita Yunus ~ 138
- 12. Reproduksi Identitas Calabai di Soppeng: (Matahari yang Tertutup Awan) Zainal ~ 148
- 13. Reproduksi Stratifikasi Sosial dalam Sistem Mantaa Duku' Kontemporer di Tikala

Ikma Citra Ranteallo ~ 164

- 14. Siri' Sebagai Budaya Hukum: Dari Pencitraan Budaya Hukum Menuju Substansi Sosial-budaya Hukum Bernilai Universal (Menggugat Pergeseran Nilai Siri'di Fenomena Lokal Sulawesi Selatan) Fadhly Azhar ~ 179
- 15. Karakter Penyelesaian Masalah Mahasiswa Makassar Chici Savitri 'Ylyp' ~ 191
- Dendam dan Pemaafan Dalam Konflik Antar Kelompok Mahasiswa di Makassar

Kurniati Zainuddin ~ 200

17. Pendidikan Karakter Sebagai Alternatif Kemorosotan Pendidikan di Indonesia

Hardianto Rahman ~ 213

18. SULAWESI SELATAN GO GREEN: Domestikasi Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Andi Fajar Asti ~ 231

Epilog ~ 249

Indeks ~ 253

Tentang Penulis ~ 261

DEMOKRASI BERBISIK DAN TRANSISI DEMOKRASI

Konflik Politik Dalam Suksesi Elit Lokal Kasus Komunitas Santri Binanga Kabupaten Enrekang

M. Ridhah Tagwa

A. Pendahuluan

Sejak pemerintahan orde baru berkuasa, apalagi setelah diberlakukannya politik massa mengambang (ploating mass), peminggiran mayoritas sosial masyarakat dalam proses politik sangat terasa pada aras lokal. Pada masa itu minoritas sosial (elit lokal), lebih dominan peranannya dalam pengambilan keputusan politik lokal, terutama elit yang mendapat restu dari elit politik di atasnya (pemerintah daerah). Bahkan elit-elit lokal yang loyal pada pemerintah seringkali hanya sebagai sumber legitimasi bagi keputusan politik pemerintah yang kerkuasa. Kebijakan politik kemudian menjadi sangat elitis, jauh dari kepentingan mayoritas sosial (massa) dan subtansi demokrasi pada aras lokal pun menjadi tenggelam.

Model kepemimpinan Soerharto yang otoriter dan sentralistik, rupanya juga menjadi model kepemimpinan politik pada aras lokal, baik tingkat desa maupun kampung. Hal ini terjadi di Kampung Binanga di Sulawesi Selatan selama 30 tahun, dimana kepemimpinan politik dibangun di atas landasan otoritarian, jaringan yang luas, dan didukung oleh pejabat daerah serta militer. Dengan power ini, maka penguasa lokal menjadi sangat dominan menguasai berbagai aspek kehidupan waraga, tidak hanya pada aspek politik tetapi juga aspek

kehidupan beragama dan kegiatan ekonomi.

Menjelang terjadi perubahan dari orde baru ke orde reformasi, iklim politik menjadi sangat terbuka dan transparan. Dalam suasana itulah yang kemudian banyak mengilhami, sekaligus mendorong komunitas lokal yang mengalami peminggiran dari arena politik untuk keluar dari kepemimpinan politik ototitarian dan represif. Untuk itulah kaum reformis pada aras lokal yang dimotori oleh

2

0

generasi muda untuk memakzulkan kepemimpinan kepala kampung. Atas 'izin' elit daerah, mereka pun menggelar pemilihan kepala kampung yang sangat unik. Model pemilihan yang disepakati adalah pemilihan langsung oleh rakyat, tidak lagi atas persetujuan elit-elit lokal saja. Caranya pun unik, karena pemilih dalam menentukan pilihannya dengan cara membisikkan pilihannya pada panitia pemilih.

Kekuasaan politik lokal pada komunitas santri ini, sepanjang sejarahnya memang menjadi ajang pertarungan antara elit sipil dan pensiunan militer, karena intervensi pemerintah sampai akhirnya dikuasai oleh elit sipil selama belasan tahun melalui kombinasi dukungan politik dari dua arah. *Pertama*, dari pejabat pemerintah daerah (kecamatan-Kabupaten), dengan jaminan kesediaan memobilisasi penduduk setempat untuk mendukung Golkar dalam pemilu. Kedua, dari komunitas kampung sendiri yang memang tidak setuju dipimpin oleh pensiunan militer.

Sebelum era reformasi, rekrutmen elit politik lokal sangat elitis dan dikontrol ketat oleh pemerintah daerah, terutama karena komunitas santri di kampung ini menjadi basis pendukung partai Islam yang bagi pemerintah-Golkar dianggap sebagai aib politik. Setelah memasuki era reformasi, masyarakat khususnya pemuda menuntut perubahan rekrutmen kepala kampung melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat. Mekanisme pemilihannya pun unik tidak dengan cara konvensional, karena pemilih hanya membisikkan pilihannya pada panitia pemilih. Dan inilah yang saya dimaksud demokrasi berbisik.

Dengan gambaran di atas menjadi menarik untuk dikaji tentang bagaimana pertarungan politik (konflik) lokal inter sipil, dan antar sipil-militer, serta prospek demokrasi pada era reformasi pada aras lokal. Bagaimana perbandingan pola rekrutmen sebelum dan setelah reformasi, dari arena elitis ke massa?. Apakah transisi demokrasi yang telah melahirkan elit politik lokal baru dari sipil terdidik akan mampu mengantarkan terkonsolidasinya demokrasi aras lokal yang subtantif. Masalah-masalah tersebut yang menjadi fokus dalam makalah ini. Sebelum mengulas materi ini, sebelumnya diuraikan perspektif teoritis konflik yang digunakan sebagai pisau atau instrumen analisis.

B. Kerangka Pemikiran Konflik

Walaupun para teoritikus ilmu sosial berbeda pandangan dalam menjelaskan fenomena konflik, tetapi secara umum konflik diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu-kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sasaran tersebut mencakup semua aspek

Lihat Simon Fisher, dkk., 2000, Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. British Council-RTC. Jakarta, hlm. 4.

kehidupan, termasuk kehidupan politik. Mack, Snyder dan Gurr merumuskan 4 syarat atau indikator konflik, yaitu: (1) Terdapat dua atau lebih pihak yang berkonflik; (2). Pihak-pihak tersebut saling tarik-menarik dalam aksi saling memusuhi (mutually opposing actions); (3) Cenderung berperilaku koersif untuk memusuhi dan menghancurkan musuh; (4). Adanya ketegasan sikap masingmasing pihak, sehingga dapat terdeteksi pihak lain.2 Dengan pemetaan sebagai instrumen analisis konflik, akan diketahui pihak-pihak utama yang ada dalam arena konflik, berikut dengan posisi, kepentingan dan kebutuhannya masingmasing pihak. Model analisis seperti ini biasanya disebut analogi Bawang Bombay.3

Karena konflik politik senantiasa mengalami pasang surut sesuai dengan momen politik dan kepentingan politik yang menyertainya, seperti rekrutmen elit lokal yang sarat dengan benturan kepentingan, maka tidak mengherankan konflik politik memiliki struktur konflik atau adanya sejumlah pihak yang berlatar belakang sosial ekonomi politik yang berbeda kepentingannya. Bersama dengan itu konflik pun mempunyai keluasan, ketampakan dan intensitas yang berbeda-beda, baik dari segi waktu (momen politik) atau situasi sosial politik tertentu, seperti pada era reformasi.

Konsep-konsep yang menjadi acuan penelitian ini, sebagian telah dirumuskan oleh teoritikus ilmu sosial, antara lain Dahrendorf, Gobb dan Elder. Menurut Dahrendorf Intensitas konflik menunjuk pada pengeluaran energi dan tingkat keterlibatan oleh pihak yang berkonflik, sedang kekerasan konflik menunjuk pada alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengejar kepentingannya.4 Selanjutnya Cobb dan Elder merumuskan dimensi konflik yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu keluasan, intensitas dan ketampakannya.⁵ Keluasan konflik menunjuk pada jumlah orang atau kelompok yang terlibat dalam konflik dan skala konflik, sedang intensitas konflik menunjuk pada sempit-luasnya komitmen sosial yang bisa terbangun akibat sebuah konflik. Jika konflik intensitasnya tinggi, maka komitmen sosial yang terbangun menjadi meluas dan konflik pun semakin berkembang. Dimensi ketampakan konflik menunjuk pada tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat, di luar pihak yang berkonflik tentang peristiwa konflik. Konflik yang memiliki ketampakan tinggi adalah konflik yang disadari dan diketahui secara meluas dan mendalam oleh masyarakat.

Dimensi konflik di atas selanjutnya akan dijadikan sebagai instrumen analisis untuk memahami percaturan politik lokal (kampung) yang juga melibatkan elit daerah. Arena suksesi kepala kampung diasumsikan sarat dengan konflik kepentingan antara berbagai pihak, baik internal masyarakat, maupun antar

Lihat Fatah, Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi. Prisma no. 8, Agustus 1994, hlm. 47.

Dahrendorf menggunakan konsep kekerasan terbuka. Dalam Johnson, 1986. Teori Sosiologi Klasik-Modern, Jilid II, Robert M.Z. Lawang (terj.). Gramedia, Jakarta, hlm. 189.

E.S. Fatah, Op. Cit., hlm. 49.

organisasi sosial politik, pemerintah daerah. Suksesi politik lokal yang dikendalikan (intervensi) pemerintah daerah tampaknya masih tetap berlaku pada transisi demokrasi ini, sebagaimana yang telah menjadi garis kebijakan politik Orde Baru selama puluhan tahun.⁶

Konflik politik dalam suatu masyarakat, biasanya lebih banyak diperankan oleh kalangan elit politik, karena itu konsep elit politik (lokal) penting dirumuskan. Elit politik tidak hanya bagi mereka yang memiliki kedudukan politik, tetapi semua orang atau kelompok yang karena memiliki sumber daya lebih dan mampu mempengaruhi keputusan politik pada semua aspek kehidupan.7 Elit lokal menunjuk pada elit politik yang diakai dan atau berlaku pada tingkat lokal yang kemudian berpengaruh atau mempengaruhi proses politik. Dengan demikian elit politik lokal berarti elit yang berpengaruh dalam proses politik hanya pada aras lokal, karena kelebihannya, baik dari segi ilmu pengetahuan, pendidikan, status sosial, dan dihormati oleh masyarakat setempat.8 Atas dasar itu, untuk menentukan elit lokal akan diidentifikasi dengan 3 cara. Pertama, mereka yang karena kedudukan atau posisinya dalam struktur organisasi pemerintahan lokal dan organisasi sosial. Kedua, bagi mereka yang memiliki reputasi, misalnya karena merupakan tokoh agama atau intelektual yang dihormati. Ketiga, terhadap mereka yang mampu mempengaruhi keputusan politik lokal, dan juga karena memiliki jaringan yang luas, baik terhadap birokrasi maupun militer.

Dari uraian teori-teori konflik dan analisis konflik di atas dapat dirumuskan fokus kajian ini pada seting konflik yang meliputi posisi pihak yang berkonflik, kepentingan dan kebutuhan atau tujuannya. Analisis kemudian dipertajam dengan menguraikan proses konflik yang meliputi keluasan, intensitas, ketampakan konflik politik, serta implikasinya bagi perkembangan demokrasi pada aras lokal. Dari sisi seting kemudian pihak yang berkonflik mengembangkan isu-isu politik seperti identitas budaya, dan isu tersebut bersifat dinamis mengikuti proses konflik.

Selanjutnya model analisis konflik elit lokal dalam suksesi atau rekrutmen elit lokal dan implikasinya bagi demokrasi pada aras lokal digambarkan dalam bentuk skema berikut:

Lihat Annual Report 2001-2002, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal. IRE, Yoyakarta, hlm. 67-70.

Lihat S.M. Lipset. The Encyclopedia of Democracy. Vol. 1, hlm. 426-428.

Lihat S. Usman, Pengaruh dan Jaringan Interaksi Elit Lokal dalam Pembangunan. Prospektif, Vol. 2, No. 4, 1990, dan Mappawata, Hubungan Patron Client. Jurnal Tamalanrea, Edisi pertama. Ujungpandang.

Posisi Pihak
Berkonflik

PROSES
KONFLIK

IMPLIKASI
KONFLIK

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Konflik Elit Lokal

Pihak yang berkonflik tidak hanya terbatas pada elit lokal, tetapi sebagian anggota keluarga dan jaringannya) atau kelompok yang memposisikan diri sebagai salah satu pihak dalam konflik politik itu. Kepentingan lebih ditekankan pada manfaat yang akan diperoleh jika salah satu pihak memenangkan konflik seperti kedudukan sosial dan peluang ekonomiyang lebih baik. Sedangkan kebutuhan menunjuk pada tujuan yang ideal misalnya berkembangnya demokrasi (supremasi sipil), peningkatan kesejahteraan warga dan pemerataan akses ekonomi, serta peningkatan pelayanan dari kepala kampung. Dari tujuan ideal dan kepentingan ini kemudian dikemas menjadi isu-isu politik dari kedua belah pihak yang berkonflik. Isu-isu politik ini berkembang terus untuk memperkuat posisi masing-masing seiring dengan intensitas, ketampakan dan keluasan konflik.

Keterkaitan antara pejabat daerah dalam arena konflik juga berfungsi untuk melihat luas, intensitas dan ketampakan konflik. Sejauh mana pihak yang saling berlawanan melibatkan atau didukung oleh massa. Keluasan konflik juga berkaitan dengan intensitas yang menujuk pada komitmen yang terbangun sebagai akibat konflik. Jika komitmen semakin meluas maka ketampakan konflik pun semakin nyata bagi masyarakat (konflik manifest). Dengan komitmen yang mendalam itu memungkinkan terjadinya perubahan seting konflik, karena pihak yang berkonflik berusaha mencari titik temu dengan pihak tertentu untuk kemudian bergabung menghadapi pihak lain. Pada saat bersamaan, relasi sosial ekonomi tersebut membuka jalan terbentuknya konsistensi konflik, seperti

karena kedekatan identitas sosial budaya (kerabat) dan usaha ekonomi (kolusi). Konsep konsistensi konflik ini merujuk pada teori Dahrendorf bahwa anggota kelompok atau pihak yang berkonflik saling berkomprontasi dalam macammacam asosiasional, dan energi yang dikeluarkan disatukan dalam asosiasi untuk menghadapi pihak lain.⁹

C. Konflik Sipil-Militer Dalam Kepemimpinan Elit Lokal

Kampung Binanga hanya berpenduduk sekitar 600 jiwa orang dengan jumlah rumah tangga sekitar 139 yang terbagi menjadi 3 RW. Perkampungan yang berada di tepi sungai Saddang (Sungai terbesar di Sulawesi Selatan) ini berjarak sekitar 7 KM dari kota kabupaten (Enrekang) dan 230 KM dari kota propinsi (Makassar). Meskipun penduduknya relatif sedikit dan baru pada tahun 2007 bisa dijangkau oleh transportasi darat (roda empat) tetapi kehidupan sosial, politik dan ekonominya cukup dinamis dan menarik perhatian berbagai kalangan, khususnya politisi, militer dan pejabat pemerintah di daerah sejak era orde baru hingga orde reformasi.

Diantara berbagai aspek yang menarik perhatian berbagai kalangan itu adalah aspek politik, terutama perilaku memilih (voting behavior) pada pemilihan umum dan pertarungan elit politik lokal khususnya rekrutmen dan kepemimpinan kepala kampung. Hasil-hasil pemilu menjadi referensi yang penting terhadap polarisasi dan dukungan elit lokal yang aktif dalam memobilisasi massa. Pada Pemilu 1971-1987 dukungan pada Partai Islam masih sangat signifikan dan fenomena ini menjadi simbol diminasi elit sipil untuk memobilisasi massa (ummat) untuk memilih partai Islam. Sedangkan kalangan pensiunan militer dan sebagain PNS mendorong massa untuk memilih Golkar.

Pada rentang waktu yang sama (1970-an hingga awal 1980-an) arena kepemimpinan politik lokal (kepala kampung) diwarnai dengan pertarungan (konflik) antara elit sipil dan pensiunan militer baik dalam rekrutmennya, maupun dalam proses menjalangkan kepemimpinannya. Jika sipil yang tampil sebagai kepala kampung, maka pensiunan militer tampil sebagai oposisi dan menentang berbagai kebijakan politik elit sipil, baik yang tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintahan orde baru maupun yang hanya karena tidak sesuai dengan selera pribadinya (khususnya gaya kepemimpinan sipil). Dalam melancarkan aksi-aksi politiknya senantiasa melibatkan institusi militer/termasuk kepolisian dengan memberikan laporan-laporan tindakan politik kemunitas sipil yang menurut persepsinya akan mengganggu jalannya pemerintahan di daerah, atau dalam wacana kekuasaan pemerintah Orde Baru adalah meronrong kewibawaan pemerintah.

R. Dahrendorf, 1986, Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa-Kritik. cetakan pertama, Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 190.

Demikian pula sebaliknya, jika pensiunan militer yang tampil sebagai kepala kampung, maka kalangan sipil menjadi oposisi. Sikap oposisi yang diambil selain karena gaya kepemimpinannya yang otoriter-militeristik, juga karena sering memberikan laporan kepada pemerintah daerah yang merugikan masyarakat sipil. Dalam menjalangkan aksi politiknya elit sipil mencari memperkuat kedudukan oposisinya dengan dukungan komunitas sipil, misalnya dengan membaikot perintah kepala kampung atau dengan membuat petisi. Pada tertengah tahun 1970-an, elit-elit sipil muda membuat mosi tidak percaya pada kepala kampung yang berlatar belakang pensiunan militer dan disampaikan dan bahkan dibawa sendiri kepada Bupati kab. Enrekang. Dan segera setelah penyampaian aspirasi politik itu, ia diberhentikan sebagai kepala kampung. Setelah itu kepemimpinan lokal dari persiunan militer digantikan oleh elit sipil dari Muhammdiyah. Menariknya penggantinya (Abd. Hamid) masih saudara seipar dengan kepala kampung sebelumnya.

Dalam kurun waktu 30 tahun, 1971-2001 terjadi 7 kali terjadi suksesi kepemimpinan politik lokal yang terdiri dari 4 orang sipil dan 3 orang pensiunan militer. Kedua pihak ini silih berganti dalam menduduki jabatan kepala kampung, hingga akhirnya kembali ke sipil pada tahun 1990-an sampai 2000-an. Secara keseluruhan, elit sipil yang paling lama berkuasa dibanding dengan elit yang berlatar belakang pensiunan militer. Hal ini terutama berlaku pada kepemimpinan Abdul Kadir Kaddong. Kemampuan elit sipil ini untuk betahan selain karena memiliki kapasitas kepemimpinan (strong leadership) juga memiliki jaringan yang luas. Jaringan tersebut tidak hanya terhadap pejabat sipil di daerah, tokoh agama juga jaringan para pelaku tindak kriminal lembu. Aktor pelaku tindak kriminal ini sering beroperasi di daerah aliran sungai (DAS) Saddang sebelah barat. Menjalin jaringan dengan pelaku tindak kriminal merupakan modal kekuasaan yang tidak dimiliki elit meliter, dan atau pun elit sipil lainnya. Modal kekuasaan jaringan ini berperan ganda, selain untuk menjaga atau menjamin keamanan Kampung, juga untuk memberi peringatan atau pelajaran kepada para oposan. Bagi oposan yang suka menentang, ternaknya seringkali terancam oleh pencuri atau difasilitasi proses pencuriannya. Hal ini pernah dialami Pak Abdul Hamid yang menolak ajakan Kepala Kampung untuk mendukung partai pemerintah dalam pemilihan umum. Ketika itu, empat ternaknya hilang di kebun, dan beberapa bulan kemudian diketahui bahwa peritiswa itu bernuangsa politik balas dendam.

Berikut nama-nama yang pernah menduduki posisi sebagai kepala Kampung selama 30 tahun, beserta waktu berkuasa dan latar belakangnya.

Tabel Nama Pejabat Kepala Kampung dan Latar Belakangnya, 1970-2001

No.	Nama	Tahun	Latar Belakang	Keterangan
1.	Daenna Sana	1970-1973	Sipil	Meninggal Dunia
2.	Yusuf Hamid	1973-1977	Militer	Mosi tidak percaya
3.	Abdul Hamid	1977-1979	Sipil	Mundur
4.	P. Bello	1979-1983	Militer	Meninggal Dunia
5.	Syamsuddin	1984-1986	Militer	Mundur diri
6.	Abd. Kadir	1986-1997	Sipil-pengusaha	Mundur/sakit
7.	M. Jafar	1997-2009	Sipil-guru	Dipilih langsung

Sumber: Diolah dari data primer, 2003

Proses pergantian kepala kampung di atas banyak diwarnai oleh konflik politik antar elit lokal sendiri, baik pada kepemimpinan persiunan militer, maupun elit sipil. Penyebabnya terutama karena para elit politik lokal ini lebih mengedepankan pada pola kepemimpinan yang otoriter, bahkan terkadang represif. Bagi pemimpin berlatar belakang militer seringkali mengadukan warganya ke Kodim atau Koramil jika ada pihak yang menentang atau berbeda pandangan. Bahkan setelah tidak menjabat pun masih melaporkan warga yang dinilai meronrong kewibawaan pemerintah. Korbannya antara lain Pak Gaffar. Katika itu (1982) ia menyampaikan ceramah agama di Masjid yang mendorong agar warga memilih Partai yang akan memperjuangkan dan menegakkan syariat Islam. Akibatnya ia mendekam di Tahanan selama beberapa pekan, dan baru dibebaskan melalui perjuangan (lobby) yang cukup alot, terutama oleh politisi PPP (Pak Jabbar Basyir). Kelak kemudian tokoh agama ini akhirnya memilih untuk aktif sebagai politisi melalui Partai Politik Islam (PPP).

Tujuan atau kepentingan konflik politik di atas, selain untuk berebut pengaruh kepada masyarakat dan mengembangkan relasi dengan pejabat daerah, juga untuk penguasaan modal sosial ekonomi di aras kampung. Sekalipun hasilhasil bumi jumlahnya masih terbatas dari hasil pertanian dan hutan, tetapi mobilitas sosial ekonomi masyarakatnya cukup tinggi. Kesuksesan tersebut terutama melalui pendidikan dan pengiriman Tenaga kerja ke luar negeri, terutama ke Malaysia Timur (Sabah). Mereka yang merantau suskses menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan dengan mobilitas pendidikan ini banyak anak-anak warga yang menetap di kota dan banyak pula yang telah berprofesi sebagai PNS.

D. Demokrasi Berbisik: Keunikan Rekrutmen Elit Lokal

Selama orde baru atau dalam kurun waktu 30 tahun, rekrutmen elit politik lokal ditunjuk oleh pemerintah daerah (kabupaten/kecamatan) lalu kemudian

diminta persetujuan atau konsensus para elit lokal setempat. Dengan demikian yang paling menetukan adalah pemerintah daerah, bukan elit lokal itu sendiri masyarakat luas (mayoritas sosial). Memang masyarakat tidak secara langsung menolak kepemimpinan pensiunan militer, tetapi warga sipil cepat memberi respon ada kebijakan atau tindakannya yang tidak diterima oleh masyarakat setempat. Dalam konteks penolakan inilah elit sipil, baik dari elit agama maupun elit tradisional tampil untuk mendorong reformasi kepala kampung.

Dari sisi konteks konflik, setidaknya ada dua persentuhan kepentingan antara elit agama dan tradisional. Elit agama cenderung berbeda dengan pensiunanan militer untuk menempatkan posisi agama dalam kehidupan bermasyarakat. Elit agama meletakkan Islam sebagai sistem nilai yang tepat mengatur kehidupan politik berbangsa, sementara elit dari pensiunan militer hanya memposisikan agama dalam konteks bada khas. Sementara itu elit adat, walaupun kesantriannya tidak diragukan lagi, namun kepentingan kekuasaan untuk menduduki jabatan kepala kampung sekaligus kepala ingkungan yang lebih menonjol. Karena itulah, setelah salah seorang pensiunan militer mundur dari jabatannya, tidak seorang pun pejabat pemerintah daerah yang berani menunjuk siapa yang pantas menjadi kepala kampung. Akhirnya, jabatan itu kembali disandang oleh elit tradisional-santri yang tidak pernah menammatkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar atau SR.

Prospek demokrasi pada kepemimpinan sipil pun rendah, karena tetap saja otoriter dan hanya menjadi agen politik pemerintah daerah. Hal ini berlaku pada kepemimpinan A. Kadir selama 20 tahun. Kemampuan untuk bertahan selain dengan modal jaringan yang luas, pada pejabat pemerintah di atasnya, juga ke bawah. Sekalipun tewrjadi pergantian Kepala Daerah (Bupati), tetapi ia cepat bersosialisasi sehingga mampu menjaga relasi kekuasaannya pada tingkat pejabat daerah. Kampunnya berarumentasi dan mengerahkan massa merupakan modal sosial yang lain yang tidak dimiliki oleh kepala kampung sebelum dan sesudahnya. Selain itu ia juga mampu mengelola sumberdaya alam di sekitar kampung sehingga mudah dikonversi menjadi modal ekonomi. 10

Setelah memasuki era orde reformasi kemudian eit-elit muda mengelar pemilihn kepala kampung secara langsung. Proses itu berlangsung atas izin dari pejabat daerah (kabupaten dan kecamatan) setelah para pemuda setempat mendemo kepala kampung yang dipandang otoriter dan telah berkuasa puluhan tahun (30 sebagai kepala kampung dan kepala lingkungan). Proses rekruitmen terbilang unik, karena pemilih hanya membisikkan pilihan terhadap 2 kandidat kepada panitia pemilih dan didengarkan oleh saksi. Demokrasi berbisik seperti ini mungkin pertama kali terjadi dalam suksesi elit lokal.

Kalau ada warga yang belum mampu membayar pajak secara tunai, maka ia dapat menerima hasil-hasil pertanian dan perkebunan sebagai gantinya. Sedangkan pajaknya berupa uang tunai dibayarkan langsung kepada pemerintah daerah (Dispenda). Hal ini sangat memudahkan warga untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai warga negara.

Proses ini mengindikasikan bangkitnya semangat warga untuk memperjuangkan hak-hak politiknya melalui demokrasi (pemilihan) secara langsung. Suatu bentuk rekrutmen elit politik lokal yang melibatkan mereka secara utuh. Bahkan tidak hanya dengan tujuan itu, warga secara subtansial memang mengharapkan ada perubahan paradigma yang selama ini memposisikan mereka sebagai obyek politik kearah diposisikan sebagai subyek.

E. Implikasi Dan Prospek Demokrasi Kedepan

Ada banyak implikasi yang ditimbulkan dari kepemimpinan elit lokal yang diwarnai konflik antar elit lokal. Pertama, konflik elit itu memiliki keluasan dan intensitas yang cukup tinggi, dimana elit politik daerah juga turut bermain sehingga pertarungan politik menjadi kompleks. Intensitasnya juga cukup tinggi, sehingga memerlukan energi yang cukup besar untuk mempertahankan posisi masing-masing, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal kepada elit daerah, sedangkan horizontal dengan elit lokal yang selevel. Tidak hanya energi elit yang terkuras tetapi juga warga, khususnya yang termasuk dalam jaringan kekuasaan elit sipil-militer.

Kedua, implikasi dari konflik elit lokal berupa kegagalan program pembangunan khususnya poembangunan infrastruktur seperti jembatan. Pembangunan jembatan yang melitansi Sungai Saddang senantiasa menjadi komuditas politik sebelum pemilu. Namun seusai pemilu, meskipun partai pemerintah menang, tetap saja pembangunan jembatan gagal direalisasikan. Karena itulah, pada awal orde reforasi pembangunan jembatan kembali digalakkan oleh kepala kampung bersama masyarakat seetempat.

Pertanyan selanjutnya, setelah kemimpinan kembali ditangan sipil yang dipilih secara demokratis apakah prospek demokrasi menjadi lebih cerah (subtantif), atau hanya perubahan elit wajah baru? Mungkin juga elit politinya wajah baru tetapi wacana politiknya masih paradigma lama. Salah satu pola kepemiminannya yang masih gaya lama dimana dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya belum banyak melibatkan warga. Ruang dialog antar warga dan elit politik lokalnya masih terbatas. Warga ganya terlibat pada proses pemilihan untuk menentukan pemimpin, tetapi setelah terpilih aksesnya menjadi terbatas. Ruang-ruang dialog warga belum diakomodasi, sehingga yang muncul hanyalah wacana yang sifat masih liar, belum difasilitasi oleh kelembagaan politik yang ada.

Dengan demikian prospek demokrasi masih suram, karena setelah pemilihan komunikasi politik tidak berkembang lagi. Apalagi tidak maksimalnya fungsi lembaga permusyawaratan pada aras lokal, baik tingkat desa maupun kampung. Sementara Masyarakat masih terbiasa menunggu perintah/komando dari elit lokal (kepala kampung). Nuangsa proses politik berupa mobilisasi politik pada era sebelumnya ternyata masih melekat dalam masyarakat.

Persoalannya komunitas lokal ini belum mampu mengembangkan pelembagaan politik yang mampu mendorong demokrasi pada aras lokal. Belum terbinanya pola komunikasi politik untuk mencapai konsensus yang dapat diterima semua pihak. Masyarakat tampaknya justru terjebak pada konfik-konflik lokal baru yang sangat potensial memperlambat, bahkan menghambat perkembangan demokrasi ekonomi-politik selanjutnya. Oleh karena kepemimpinan politik sebelumnya yang sangat otoritarian masih melekat di hati masyarakat, maka pengembangan dan pelembagaan partisipasi politik, untuk mendorong partisipasi dan pendewasaan demokrasi pada aras lokal menjadi sangat urgen dan mendesak. Peranan harapan (role expectation) komunitas lokal terhadap proses seperti ini sangat tinggi, terutama karena di kampung ini kelembagaan pemerintahan desa juga tidak berjalan.

F. Penutup

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian di atas. *Pertama*, proses demokratisasi pada aras lokal (kampung) pun menarik untuk dicermati sebagai bagian dari proses pendewasaan demokrasi di tanah air. Komunitas politik lokal, sudah membangun pola demokrasi dengan pemilihan langsung. Memaknai demokrasi dengan kembalinya kedaulatan pada mereka dengan bebas menentukan aspirasi politiknya.

Kedua, telah terjadi perubahan pola rekrutmen politik dari aras minoritas sosial (elit) ke mayoritas sosial (massa). Sebelumnya rekrutmen elit politik lokal atas penunjukkan pemerintah daerah dan diminta persetujuan dari elit lokal, menjadi rekrutmen dengan pemilihan langsung oleh rakyat, meskipun dengan cara yang unik (pemilihan dengan berbisik). Perubahan menujukkan kemakuan bagi perwujudan kedaulatan di tangan rakyat.

Ketiga, perubahan tersebut belum memberikan jaminan bagi pengembangan demokrasi selanjutnya, terutama untuk menyusun program pembangunan/pemberdayaan masyarakat desa yang partisipatif. Masyarakat desa belum begitu komunikatif untuk menyampaikan aspirasinya dan belum adanya lembaga-lembaga formal baru yang mendukung proses itu. Kepala kampung tidak mampu menjalangkan aktifitas politiknya, selain karena kamampuan terbatas, juga karena kompleksitasnya permasalah yang dihadapi oleh komunitas tersebut, serta struktur yang belum mendukung termasuk pemerntah di atasnya.

Keempat, pertarungan elit sipil dan militer selama puluhan tahun yang mewarnai kepemipinan lokal telah menimbulkan implikasi yang luas dan mendalam. Karena itu perlu dikembangkan demokrasi yang tidak hanya memenuhi secara prosedural, tetapi yang lebih penting adalah subtansial. Proses itu memerlukan pendidikan politik yang lebih intensif dan pendampingan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Proses ini diperlukan, agar warga tidak lagi menjadi obyek mobilisasi politik elit lokal.

Daftar Pustaka

- Bambang, Budiyanto 2001. Interaksi antara Pemerintah Desa dan Kekuatan-Kekuatan Politik Lokal di desa Lapoit. Jurnal Renai Th. I, No. 2, April-Mei 2001.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 1990. Tafsir Sosial atas kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. Terj. Hasan Basari. Cet. I. LP3ES, Jakarta.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa-Kritik. Cet. I, Rajawali Pers. Jakarta.
- Duverger, Maurice. 2002. Sosiologi Politik. Terj. Daniel Dhakidae. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Fatah, R. Eef Saefulloh. 1994. Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi. Prisma, No. 8, Agustus 1994. Jakarta.
- Fisher, Simon. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. The British Council-Responding to Conflict, Jakarta.
- Galtung, Johan. 2002. Kekerasan Kultural. Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 9, tahun III. Insist Press, Yogyakarta.
- Kammen, Douglas. 2001. Pilkades: Democracy, Village Election and Protest In Indonesia. Jurnal Renai Th. I, No. 2, April-Mei 2001.
- Lipset, Seymour M. (editor). 1995. The Encyclopedia of Democracy. CQ Inc. Washington, D.C. Vol. 1, hal. 426-428.
- Malley, Michael. 2001. Conflict, Reform, and Regional Political Leadership. Renai, Jurnal Politik Lokal dan Sosial Humaniora. Tahun 1, No. 3. Juli-September. Hal. 34-54.
- Pelly. Usman. 1993. Pengukuran Intensitas Potensi Konflik dalam Masyarakat majemuk. Analisis CSIS. Tahun XXII, No. 3. Mei-Juni 1993.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 1988. Minawang: Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan. Cet. I, Gama University Press. Yogyakarta.
- Simandjuntak, Bungaran A. 1996. Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba. Majalah Prisma. No. 6, Tahun XXV, Juni 1996.
- Sujito, Arie dan Sutoro Eko. 2002. *Demiliterisasi, demokratisasi dan desentralisasi*. IRE Press, Yogyakarta.
- Taqwa, M. Ridhah. Perilaku Politik Ummat Islam, Kasus di Lekkong Sulawesi Selatan. Prisma, No. 3 tahun 1996.
- Taqwa, M. Ridhah. 1997. Elit Lokal dan Mobilisasi Politik. Makalah Seminar SKJ Fisip Unsri, 19 Mei 1997 di Kampus Unsri Inderalaya.
- Usman, Sunyoto. 2001. Konflik dan Resolusi Konflik Sumber Daya Alam, Perspektif Sosiologi. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fisipol UGM. 15 Sepetember 2001. Yogyakarta.